



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**PENGARUH KENAIKAN UPAH MINIMUM PROVINSI
(UMP), PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), DAN
JUMLAH PENDUDUK TERHADAP PENERIMAAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
DI PROVINSI DKI JAKARTA**

SKRIPSI

Kiki Dwi Wulandari

1502019011

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
JAKARTA
2021



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**PENGARUH KENAIKAN UPAH MINIMUM PROVINSI
(UMP), PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), DAN
JUMLAH PENDUDUK TERHADAP PENERIMAAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
DI PROVINSI DKI JAKARTA**

SKRIPSI

Kiki Dwi Wulandari

1502019011

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
JAKARTA
2021

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi dengan judul **“PENGARUH KENAIKAN UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP), PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN JDMLAII PENDUDUK TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN ASH DAERAH (PAD) Di PROVINSI DKI JAKARTA”**. merupakan hasil karya saya sendiri dan sepanjang pengetahuan dan keyakinan saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagian bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA atau perguruan tinggi lainnya. Semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturandi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Jakarta, Februari 2020
Yang menyatakan




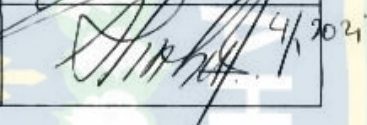
Kiki Dwi Wulandari
NIM. 1502019011

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

JUDUL : PENGARUH KENAIKAN UPAH MINIMUM
PROVINSI (UMP), PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR (PKB) DAN JUMLAH PENDUDUK
TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) DI PROVINSI DKI JAKARTA

NAMA : KIKIDWIWULANDARI
NIM : 1502019011
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
TAHUN AKADEMIK : 2015

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan dalam ujian skripsi

Pembimbing I	Ahmad Subaki, SE., Ak., MM.	
Pembimbing II	Daram Heriansyah, SE., M.Si.	

Mengetahui,
Ketua Program Studi Akutansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka



Sumardi, S.E.,M.Si

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul :

PENGARUH KENAIKAN UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP), PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN JURNLAH PENDUDUK
TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
DI PROVINSI DKI JAKARTA

Yang disusun oleh ;
Kiki Dwi Wulandari
1502019011

Telah diperiksa dan dipertahankan di depan panitia ujian kesarjanaan strata satu
(SI) Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah
Prof. DR. HAMKA
Pada tanggal : 18 Desember 2021

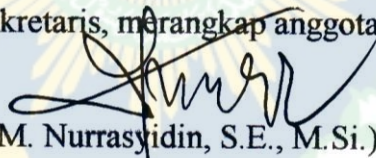
Tim Penguji :

Ketua, merangkap anggota :



(Sumardi, S.E., M.Si.)

Sekretaris, merangkap anggota:



(M. Nurrahyidin, S.E., M.Si.)

Anggota :



(Meita Larasati, S.Pd., M.Sc.)

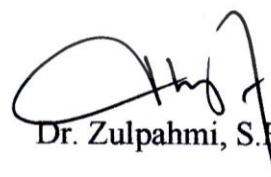
Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Prof. DR. HAMKA



Meita Larasati, S.Pd., M.Sc.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Prof. DR. HAMKA



Dr. Zulpahmi, S.E., M.Si

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA. Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kiki Dwi Wulandari
Nim : 1502019011
Program Studi : Akutansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“PENGARUH KENAIKAN UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP), PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI PROVINSI DKI JAKARTA”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA berhak menyirnpkan, mengalihmediakan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempubltkasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 18 Desember 2021
Yang Menyatakan



Kiki Dwi Wulandari
1502019011

ABSTRAK

Kiki Dwi Wulandari (1502019011)

PENGARUH KENAIKAN UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP), PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI PROVINSI DKI JAKARTA.

Skripsi, Program Strata Satu Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR.HAMKA.2020. Jakarta.

Kata Kunci : Upah Minimum Provinsi, Pajak Kendaraan Bermotor, Jumlah Penduduk dan Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Jumlah Penduduk Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi DKI Jakarta.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dan inferensial. Pengumpulan data bersumber dari standar upah minimum provinsi, jumlah penduduk, pajak kendaraan bermotor, dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta. Variabel yang diteliti Kenaikan Upah Minimum, Jumlah Penduduk dan Pajak Kendaraan Bermotor sebagai variabel independen dan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel dependen. Populasi dalam penelitian ini difokuskan pada data kenaikan upah minimum pajak kendaraan bermotor, jumlah penduduk dan dengan data-data yang berasal dari laporan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta periode 2014-2018. Alat analisis yang digunakan model Regresi Linear Berganda. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling dan diperoleh enam kota di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel upah minimum provinsi (-12,221) lebih kecil dari t_{tabel} ($\pm 12,706$) yang berarti upah minimum provinsi tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Secara parsial variabel pajak kendaraan bermotor (13,347) lebih besar dari t_{tabel} ($\pm 12,706$) yang

berarti pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Secara parsial variabel jumlah penduduk (12,058) lebih kecil dari t_{tabel} ($\pm 12,706$) yang berarti jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Hasil uji statistik F secara simultan menunjukkan F_{hitung} (107,543) lebih kecil dari F_{hitung} (215,707), berarti variabel upah minimum provinsi, pajak kendaraan bermotor dan jumlah penduduk secara bersama-sama memiliki pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini juga tercermin dari nilai sig. $> 0,05$.

Kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat dalam penelitian ini dapat dilihat apabila menggunakan nilai *R Square* yang telah disesuaikan atau *Adjusted R Square*. Hasil output statistik regresi pada penelitian ini didapat angka 0,988 hal ini menjelaskan bahwa kontribusi yang diberikan variabel upah minimum provinsi, pajak kendaraan bermotor, jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah sebesar 98,8% sedangkan sisanya sebesar 1,2% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak ditepati dalam penelitian ini.

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan mampu mengembangkan dan menambahkan variabel penelitian dengan menggunakan populasi dan sampel yang lebih luas lagi sehingga dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik dan lebih maksimal.

ABSTRACT

Kiki Dwi Wulandari (1502019011)

THE EFFECT OF INCREASED PROVINCIAL MINIMUM WAGE (UMP), MOTOR VEHICLE TAX (PKB), AND THE TOTAL OF POPULATION ON LOCAL REGIONAL REVENUE (PAD) IN DKI JAKARTA PROVINCE.

Thesis, Undergraduate Program in Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Prof. DR. HAMK.A. 2020. Jakarta.

Keywords: Provincial Minimum Wages, Motor Vehicle Tax, Total Population, Local Regional Revenue

This study aims to analyze The Effect of Increased Provincial Minimum Wages (UMP), Motor Vehicle Tax (PKB), And the Total Population on Local Regional Revenue (PAD) in DKI Jakarta Province.

The method used in this study is descriptive and inferential analysis methods. Data collection is sourced from provincial minimum wage standards, total population, motor vehicle tax, and local revenue from DKI Jakarta Province. The variables studied are the Increased Minimum Wages, Total Population, and Motor Vehicle Tax as the independent variables and Local Regional Revenue as the dependent variable. The population in this study is focused on the data of increased minimum wage, motor vehicle tax, total population and also the data derived from reports of revenue from DKI Jakarta Province for the period 2014-2018. The analysis method used is the Multiple Linear Regression Model. The sampling technique used is the purposive sampling method and six cities are obtained in the DKI Jakarta Province

The results showed that partially the provincial minimum wage variable (-12.221) is lesser than t_{table} (± 12.706), which means that the provincial minimum wage has no effect on local revenue. Partially the motor vehicle tax variable ($13,347$) is greater man t_{table} ($\pm 12,706$) which means that motor vehicle tax has a significant effect on local revenue. Partially the total population variable (12.058)

is lesser than t_{table} (± 12.706), which means that the total population has no effect on local revenue.

The result of the F statistical test simultaneously showed that F_{count} (107.543) is lesser than F_{count} (215.707), which means that the provincial minimum wage, motor vehicle tax, and total population variables as a whole have an insignificant positive effect on local revenue. This is also reflected in the sig value. > 0.05 .

The capability of independent variables in explaining the dependent variable in this study can be seen when using the adjusted R Square value or Adjusted R Square. The result of the regression statistical output in this study obtained a number of 0.988, this explains that the contribution given by the provincial minimum wage, motor vehicle tax, and total population to local revenue is 98.8%. while the remaining 1.2% is influenced by other factors which are not examined in this study.

The next researcher is expected to be able to develop and add more study variables by using a wider population and sample in order to produce a better and more optimal study.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia- Nya kepada peneliti serta menganugerahkan kemampuan berpikir sehingga peneliti mampu menempuh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi dalam menyusun skripsi hingga selesai dengan judul **“Pengaruh Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Jumlah Penduduk Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi DKI Jakarta”**. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya yang membawa risalah dan rahmat bagi alam semesta dan pemberi syafaat bagi umatnya di akhirat kelak.


Selama proses penyusunan skripsi ini peneliti mendapatkan banyak bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunawan Suryoputro, M. Hum selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA.
2. Bapak Dr. Zulpahmi, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA.
3. Bapak Sumardi, SE., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA.
4. Bapak M. Nurasyidin selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA.
5. Bapak Edi Setiawan, SE., MM selaku Wakil Dekan III dan IV Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA.
6. Bapak Sumardi, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah. Prof. Dr. HAMKA
7. Ahmad Subaki, SE., Ak., MM. Dosen Pembimbing I yang telah memberikan motivasi, bimbingan serta arahan hingga terselesaikan skripsi ini.

8. Daram Heriansyah, SE., M.Si. Dosen Pembimbing n yang telah memberikan motivasi, bimbingan serta arahan hingga terselesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Bapak/Ibu dosen yang telah memberi bekal ilmu yang berguna selama peneliti belajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
10. Ayah, Ibu dan keluarga tercinta yang selalu mendoakan, memberikan nasihat, dan motivasi dalam menyusun skripsi ini.
11. Teman-teman kampus program studi Akuntansi SI Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHAMKA yang memberikan dukungan, motivasi, dan doa kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan kepada peneliti.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan wawasan bagi pembaca untuk kepentingan studi dan pengembangan ilmu pengetahuan, serta saya mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk tereapannya penelitian yang lebih baik lagi. Terima kasih.

Jakarta, Februari 2020



Kiki Dwi Wulandari
NIM. 1502019011

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan	7
1.2.1 Identifikasi Masalah	7
1.2.2 Pembatasan Masalah	7
1.2.3 Perumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Gambaran Penelitian Terdahulu	10
2.1.1 Telaah Pustaka	25
2.1.2 Kenaikan Upah Minimum Provinsi	25
2.1.2.1 Pengertian upah	25
2.1.2.2 Pengertian Upah Minimum Provinsi	29
2.1.2.3 Penetapan upah minimum provinsi	31
2.1.2.4 Manfaat upah minimum provinsi	34

2.1.2.5 Pengaruh kenaikan upah minimum provinsi terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta	35
2.1.3 Pajak Kendaraan Bermotor	36
2.1.3.1 Objek Pajak Kendaraan Bermotor	37
2.1.3.2 Subjek Pajak Kendaraan bermotor	37
2.1.3.3 Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	37
2.1.3.4 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor	38
2.1.3.5 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor	40
2.1.4 Jumlah Penduduk	41
2.1.4.1 Pengertian Jumlah penduduk	41
2.1.4.2 Sensus Penduduk	44
2.1.4.3 Masalah kependudukan	44
2.1.4.4 Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta	45
2.1.5 Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	46
2.1.5.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah	46
2.1.5.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah	47
2.2 Kerangka Pemikiran Teoretis	49
2.3 Rumusan Hipotesis	50
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Metode Penelitian	51
3.2 Operasionalisasi Variabel	52
3.3 Populasi dan Sampel	54
3.4 Teknik Pengumpulan Data	55
3.4.1 Tempat dan Waktu Penelitian	55
3.4.2 Teknik Pengumpulan Data	56
3.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data	56
3.5.1 Analisis Akuntansi	56
3.5.2 Analisis Statistik Deskriptif	57
3.5.3 Pengujian Asumsi Klasik	57

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

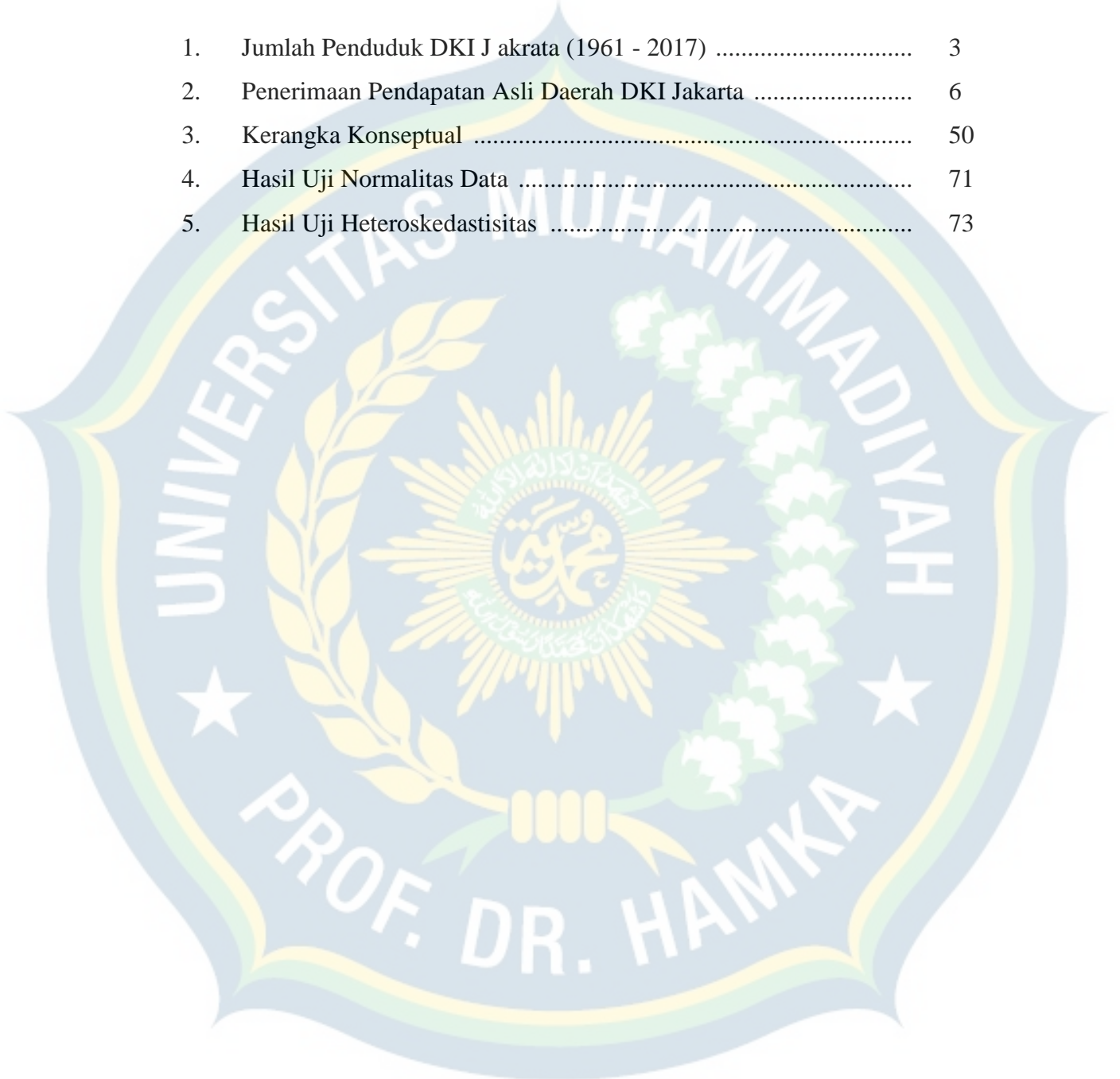
4.1 Hasil Penelitian	66
4.1.1 Upah Minimum Provinsi	66
4.1.2 Pajak Kendaraan Bermotor	67
4.1.3 Jumlah Penduduk	68
4.1.4 Pendapatan Asli Daerah	69
4.2 Analisis Statistik Deskriptif	70
4.3 Analisis Data dan Pengujian Hipotesis	71
4.3.1 Uji Keabsahan Data	71
4.3.2 Analisis Korelasi dan Regresi Berganda	74
4.4 Pengujian Hipotesis	80
4.5 Pembahasan	80
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	84
5.2 Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
1.	Ringkasan Penelitian Terdahulu	16
2.	Operasional Varmbel Kenaikan upah minimum dan Jumlah penduduk Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta	53
3.	Kriteria Pemilihan Sampel	55
4.	Daftar Sampel Kota Di Wilayah Provinsi DKI Jakarta.....	55
5.	Kriteria Autokoretasi Durbin-Watson	60
6.	Interpretasikan Nilai Koefisien Korelasi	63
7.	Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta	66
8.	Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi DKI Jakarta	67
9.	Jumlah Penduduk Provinsi DKI Jakarta	68
10.	Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta	69
11.	Statistik Deskriptif Data Penelitian	70
12.	<i>Output</i> Persamaan Regresi Berganda	74
13.	Hasil <i>Output</i> Korelasi Berganda (R)	75
14.	Hasil <i>Output</i> Uji “t”	77
15.	<i>Output</i> Uji Pengaruh Simultan (Uji F)	79

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
1.	Jumlah Penduduk DKI Jakarta (1961 - 2017)	3
2.	Penerimaan Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta	6
3.	Kerangka Konseptual	50
4.	Hasil Uji Normalitas Data	71
5.	Hasil Uji Heteroskedastisitas	73



DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul	Halaman
1.	Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta	1/14
2.	Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi DKI Jakarta.....	2/14
3.	Jumlah Penduduk Provinsi DKI Jakarta.....	3/14
4.	Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta.....	4/14
5.	Hasil statistik Deskriptif.....	5/14
6.	Hasil Uji Normalitas Data	6/14
7.	Hasil Uji Heteroskedastisitas	7/14
8.	<i>Output</i> Persamaan Regresi Berganda.....	8/14
9.	Hasil <i>Output</i> Korelasi Berganda (R)	9/14
10.	<i>Output</i> Uji Pengaruh Simultan (Uji F)	10/14
11.	Surat Tugas.....	11/14
12.	Catatan Konsultasi Pembimbing I.....	12/14
13.	Catatan Konsultasi Pembimbing II	13/14
14.	Daftar Riwayat Hidup	14/14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia termasuk negara yang mewajibkan bagi penduduknya untuk membayar pajak, sehingga proses pengaturan baik tingkatnya nasional maupun daerah akan memudahkan para warga untuk menunaikan kewajiban pajak sendiri. Pajak digunakan dalam pembiayaan, pembangunan negara dan layanan umum. Melalui kewajiban ini negara akan mendapatkan pemasukan dalam pembiayaan program kerja pemerintah yang fokusnya dalam menyelenggarakan, membangun, dan melayani masyarakat.

Pajak yang dikenakan dan diperuntukan bagi daerah adalah kewajiban yang ditujukan untuk instansi dan per seorangan yang diwajibkan sesuai dengan aturan perundang undangan yang mana pajak sendiri bermanfaat dalam membantu penyelenggaraan program agar terciptanya tujuan masyarakat yang lebih sejahtera (Sjafrial, 2014:393).

Pajak merupakan sesuatu yang wajib dilaksanakan bagi seluruh wajib pajak sebagai wujud mengabdikan dan berperan sebagai warga negara yang baik dalam pembiayaan pemasukan negara demi terciptanya pembangunan nasional yang mana aturannya telah ditetapkan dalam Undang-Undang (Judisseno, 2016:7).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan upaya dalam membiayai program pembangunan yang ada di daerah namun dalam pelaksanaannya masih saja belum mencukupi anggaran pembangunan dan pertumbuhan yang ada di daerah. Sehingga pemerintah sendiri harus mampu mencari pemasukan utama bagi daerahnya. PAD

adalah salah satu sumber pemasukan bagi daerah yang didapatkan dari kewajiban retribusi daerah, pajak daerah, dan hasil bersama dalam mengelola sumber daya alam daerah dan pemasukan lainnya yang memang telah dikelola sebelumnya dalam mencari dan menghimpun kekayaan daerah, ini merupakan bagian dari program otonomi daerah sesuai dengan asas desentralisasi (UU No. 33 Tahun 2004).

Pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan, sehingga pembiayaan dari kegiatan operasional rumah tangganya diharuskan lebih mandiri. Berpedoman pada uraian diatas maka dapat diketahui bahwa pendapatan daerah tidak terpisahkan dengan belanja daerah, hal ini dikarenakan saling keterkaitan dan anggaran yang ditetapkan merupakan ditujukan untuk program pembangunan daerah sendiri. Pemerintah pusat memberikan hak dan kewajiban serta kebebasan pemerintah daerah dalam mengurus aturan pemerintahannya, hal ini adalah upaya dalam pengembangan potensi daerah dengan pengelolaan pemasukan daerah yang lebih efektif dan efisien secara alur birokrasinya secara langsung (UU No. 23 Tahun 2014)

Besar kecilnya penerimaan pajak dipengaruhi oleh kesederhanaan, aturan dan kebijakan, sistem administrasi perpajakan, kebijakan pemerintah, kualitas layanan, warga yang lebih sadar akan pajak, dan integritas pengelola pajak. Jumlah penerimaan yang didapatkan dari pendapatan asli daerah (PAD) secara prosesnya ada pengaruh dari kenaikan upah minimum provinsi dan jumlah penduduk.

Ketetapan dari upah minimum regional (UMR) dan Upah minimum provinsi (UMP) berdasarkan jumlah minimum untuk instansi, pemerintah, perusahaan dan

lainnya dalam mengelolan insentif dari karyawannya, jumlahnya pun berbeda beda tiap daerah sendiri. Besar kecilnya ditetapkan sesuai dengan indeks harga konsumen, prospek kerja daerah, kebutuhan daerah, upah dalam regional, dan pengembangan perusahaan/instansi sendiri (Husni, 2016:147).

Pengaruh dari sistem Upah Minimum Provinsi (UMP) kepada aturan Pajak Penghasilan Badan tercermin dalam pelaksanaan wajib pajak bagi warga, hal ini ditentukan seberapa besar upah yang didapatkan dari pekerjaan mereka yang disesuaikan dengan kebutuhan hidup sehari hari.

Penduduk di Indonesia jumlahnya semakin berkembang dan kota Jakarta yang padat penduduk. Hal ini dikarenakan kota ini termasuk kota metropolitan dan ibu kota negara. Berikut disajikan data seputar kependudukan yang ada di Jakarta pada 1961 – 2017.



Gambar 1

Jumlah Penduduk DKI Jakarta (1961 - 2017)

Sesuai dengan uraian dari gambar 1 dapat disimpulkan bahwa Jakarta dengan total penghuni dengan 2,91 juta jiwa, pada 1971 angkanya naik menjadi 4,55 juta jiwa, pada 1980 mengalami peningkatan menjadi 6,48 juta jiwa, pada 1990

mencapai 8,23 juta jiwa penduduk, dan pada tahun 2020 mencapai jumlah 9,72 juta jiwa. Hal ini menggambarkan bahwa penduduk di Jakarta dari tahun ketahun terus meningkat secara angka.

Menurut BPS, DKI Jakarta di tahun 2015 dengan jumlah penduduk 10,18 juta, hingga pada tahun 2017 mencapai 10,93 juta. Sehingga dalam 2 tahun belakangan mengalami peningkatan sebanyak 269 juta penduduk dan dalam satu hari mencapai 11 penduduk baru dalam setiap jam nya. DKI Jakarta dengan kota dengan penduduk terbanyak yaitu Jakarta Timur dengan 2,89 juta penduduknya, kota Jakarta Barat dengan 2.53 juta penduduk, dan kota Jakarta Selatan dengan 2,23 juta penduduk, kota Jakarta Utara dengan 1.78 juta penduduk, kota Jakarta Pusat dengan 921 ribu penduduk, kemudian yang ada di Kabupaten Kepulauan Seribu dengan 24 ribu penduduk. Sebesar 100,61 rasio penduduk laki laki dengan perempuan yang ada di Jakarta dengan jumlah laki laki yang memenuhi Jakarta jika dibandingkan dengan perempuan menurut hasil Sensus Penduduk 2010. (Baca Databoks: Berapa Jumlah RT/RW di DKI Jakarta?)

Meningkatnya jumlah penduduk yang ada di Indonesia adalah salah satu tantangan dan permasalahan sendiri yang sangat kompleks. Dilihat dari kacamata wajib pajak, dengan adanya peningkatan penduduk akan menambah pendapatan dan pemasukan untuk PAD sendiri. Besarnya potensi yang dimiliki daerah melalui pajak sebagai pendapatan asli daerah (PAD) adalah satu hal yang menarik bagi para peneliti untuk mengkaji lebih dalam mengenai pendapatan daerah.

Beberapa penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Asmuruf, Rimate dan Kawung (2015) memiliki tujuan penganalisisan PDRB kepada PAD

yang dipengaruhi oleh Jumlah Penduduk Kota Sorong dengan metode penganalisisan regresi berganda. Hasilnya bahwa PDRB daerah yang tidak ada pengaruhnya secara signifikan kepada PAD Kota Sorong dan adanya pengaruh jumlah penduduk kepada PAD Kota Sorong sendiri.

Iman, Amaliyah dan Haviz (2019) meneliti dengan pengaruhnya jumlah penduduk, PDRB dan Anggaran Pembelanjaan Daerah kepada PAD Kabupaten Bandung, penelitian ini termasuk dalam metode kuantitatif. Metode penganalisisan dengan *views*.7 dengan Ordinary Least Square (OLS). Kemudian hasilnya menyajikan jumlah penduduk, PDRB dan Anggaran Pembelanjaan Daerah ada pengaruhnya kepada PAD secara simultan dan parsial.

Zein (2018) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dampak jumlah penduduk dan angka anggaran daerah kepada PAD Provinsi Sumatera Utara secara parsial dan simultan dengan penelitian yang termasuk dalam jenis kuantitatif deskriptif dengan jumlah sampel dalam penelitian sebanyak 30 orang. Metode penganalisisan dengan *Eviews* 9.0 yang mana hasilnya menyajikan secara parsial jumlah penduduk daerah tidak memberikan pengaruh kepada PAD Provinsi Sumatera Utara. Angka anggaran pembelanjaan berpengaruh kepada PAD Provinsi Sumatera Utara. Jumlah penduduk dan anggaran pengeluaran memberikan pengaruh terhadap PAD Provinsi Sumatera Utara secara simultan.

Disisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Juliansyah dan Sulkadria (2018) yang bertujuan untuk menganalisis dampak dari Jumlah Penduduk dan PDRB kepada PAD Kabupaten Simeulue. Data menggunakan data sekunder dari tahun 2007 hingga 2016 dan penganalisisan data dengan metode regresi linier berganda. Hasilnya dengan

jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap PAD sementara PDRB memiliki pengaruh positif kepada PAD Kabupaten Simeulue dalam 2007-2016.

Muslim, Mallongi dan Rahman (2019) melakukan penelitian yang bertujuan mengkaji adanya pengaruh PDRB, populasi penduduk dan tingkat inflasi kepada PAD Kota Kendari selama 6 tahun. Data sekunder didapatkan dari BPS dan metode penganalisisan dengan regresi linear berganda. Hasilnya dengan PDRB tidak ada pengaruh negatif kepada PAD Kota Kendari. Populasi penduduk tidak ada pengaruhnya kepada PAD Kota Kendari serta hasil yang sama pula pada tingkat inflasi tidak berpengaruh pula kepada PAD Kota Kendari pada 2012-2017.

Pertumbuhan penerimaan PAD Provinsi DKI Jakarta selama empat tahun terakhir terus mengalami kenaikan setiap tahunnya mulai dari tahun 2016-2019, namun menurun pada tahun 2018 dan naik tahun 2019. Penjelasaannya dengan data statistik pada gambar berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Gambar 2
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta

Berdasarkan praktik keterjadian, adanya perbedaan penelitian dan ketidak konsistensian penelitian di atas, penelitian ini ingin melakukan penelitian kembali dengan harapan memberikan hasil yang lebih memadai, data yang lebih relevan pada kondisi saat ini. Sehingga penulis memberikan judul dalam penelitian ini dengan judul “**Pengaruh Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Jumlah Penduduk Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi DKI Jakarta**”.

1.2 Permasalahan

1.2.1 Identifikasi Masalah

Sesuai dengan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga disampaikan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa ada pengaruhnya kenaikan upah minimum provinsi kepada penerimaan PAD Provinsi DKI Jakarta?
2. Apa ada pengaruhnya pajak kendaraan bermotor kepada penerimaan PAD Provinsi DKI Jakarta?
3. Apa ada pengaruhnya jumlah penduduk kepada penerimaan PAD Provinsi DKI Jakarta?
4. Apa ada pengaruhnya kenaikan upah minimum provinsi, pajak kendaraan bermotor dan jumlah penduduk kepada penerimaan PAD Provinsi DKI Jakarta?

1.2.2 Pembatasan Masalah

Ruang lingkup dan batasan masalah dalam penelitian lebih kepada kenaikan upah minimum provinsi, pajak kendaraan bermotor dan populasi penduduk serta

penerimaan PAD yang diukur menggunakan data sekunder yang telah diperoleh dari Kantor Dinas Pendapatan Daerah Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta periode tahun 2014-2018.

1.2.3 Perumusan Masalah

Penulis merumuskan masalah yang diangkat berupa “Bagaimana pengaruhnya kenaikan upah minimum provinsi, pajak kendaraan bermotor dan populasi penduduk mempengaruhi penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi DKI Jakarta?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penulis merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengkaji apakah kenaikan upah minimum provinsi berpengaruh kepada penerimaan PAD Provinsi DKI Jakarta.
2. Mengkaji apakah pajak kendaraan bermotor berpengaruh kepada penerimaan PAD Provinsi DKI Jakarta.
3. Mengkaji apakah populasi penduduk berpengaruh kepada penerimaan PAD Provinsi DKI Jakarta.
4. Mengkaji apakah kenaikan upah minimum provinsi, pajak kendaraan bermotor dan populasi penduduk kepada penerimaan PAD Provinsi DKI Jakarta.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian bertujuan untuk memberikan manfaat diantaranya:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menghasilkan kajian mengenai analisis laporan keuangan dalam menilai kinerja keuangan melalui rasio keuangan dan memberikan pengetahuan khususnya tentang kajian bidang akuntansi tentang analisis kenaikan upah minimum provinsi, pajak kendaraan bermotor dan jumlah penduduk terhadap penerimaan PAD Provinsi DKI Jakarta.

2. Bagi Universitas

Manfaat dalam menyumbangkan kajian pengembangan ilmu pengetahuan mengenai penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta.

3. Bagi Peneliti

Manfaat lain bagi peneliti tentang mekanisme tata kelola instansi, kenaikan upah minimum, pajak kendaraan bermotor dan jumlah penduduk kepada penerimaan PAD Provinsi DKI Jakarta

DAFTAR PUSTAKA

- Aliah, Nurul, A.B. Hamzah dan M. Nasir. 2019. Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PkB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*. Vol. 6 No. 1.
- Arikunto. Suharsimi. 2016. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asmuruf, Makdalena F., Vikie A. Rumatte, dan George M.V. Kawung. 2015. Pengaruh Pendapatan dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Sorong. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* Volume 15 No. 05.
- Badrudin, Rudy. 2017. *Ekonomi Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Basuki dan Yuliadi. 2015. *Ekonometrika Teori & Aplikasi*. Yogyakarta: Mitra Pustaka Nurani.
- Digdaya, Asep P. dan Maryono Darso. 2015. Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendapatan Perkapita, Inflasi, dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Studi Kasus Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2013). *Journal of Accounting and Banking*, Vol 4. No. 1.
- Gitaningtyas, Y. Kurniawati dan Taufik Kurrohman. 2014. *Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk, dan Investasi Swasta Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur*. Artikel Ilmiah Mahasiswa. UNEJ.
- Harahap, Ikhwanuddin dan Iain Padangsidimpuan. 2018. Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman* Volume 6 Nomor 2.
- Hasanur, Dedek. 2016. *Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Di Kabupaten/Kota Barat Selatan Provinsi Aceh)*. Skripsi Universitas Teuku Umar Meulaboh-Aceh Barat.
- Hidayat, Nurdin dan Dedi Purwana. 2017. *Perpajakan: Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Husni, Lalu. 2016. *Pengantar Hukum Ketenagakerajaan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Ilyas, Wirawan B. dan Richard Burton. 2016. *Hukum Pajak: Teori, Analisis dan Perkembangannya*, Jakarta: Salemba.
- Ghozali, Imam. 2015 *Aplikasi dan Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Iman, Idham Nur, Ima Amaliah dan Meidy Haviz. 2019. *Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB dan Belanja Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bandung Tahun 2000-2017*. Prosiding Ilmu Ekonomi. Vol. 5 No. 2.
- Joseph F. Quinn and Kevin E. Cahill. 2017. *The Relative Effectiveness of the Minimum Wage and the Earned Income Tax Credit as Anti-Poverty*.
- Juliansyah, Hijri dan Sulkadria. 2018. Pengaruh Total Penduduk Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Simeulue. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal* Volume 01 Nomor 02.
- Kerry L. Papps. 2011 *The Effects of Social Security taxes and Minimum Wages on Employment: Evidence from Turkey* IZA DP No 6214 December 2011.
- Khakim. 2016. *Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- MaCurdy, T. 2015. How Effective is the Minimum Wage at Supporting the Poor? *Journal of Political Economy*. 123(2), 497–545.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Muchtar, M., M. F. Abdullah dan D. Susilowati. 2017. Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barito Utara. *Jurnal Ilmu Ekonomi*. Vol 1 Jilid 3. Hal. 385 – 399.
- Muslim, Caesar, Syahrir Mallongi dan Zainuddin Rahman. 2019. Pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk dan Tingkat Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari. *Paradoks : Jurnal Ilmu Ekonomi* Volume 2. No. 3.
- Nabila, Lina. 2017. *Pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus: Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2005-2015)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Neumark, David and William Wascher. 2011. *Does a Higher Minimum Wage Enhance the Effectiveness of the Earned Income Tax Credit? Industrial & Labor Relations Review*. Vol. 64. No. 4. Article 5.

- Noor, J. 2017. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana.
- Panjaitan, N. Januarti dan H.M.P. Simarmata. 2017. Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Pajak Daerah. *Jurnal EK & BI Politeknik Bisnis Indonesia*.
- Perwira, Ryan. Ridwan dan Vitayanti Fattah. 2018. Pengaruh PDRB, Pengeluaran Pembangunan dan Jumlah Penduduk Produktif Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten/Kota Di Sulawesi Tengah. *e Jurnal Katalogis*, Volume 6 Nomor 2.
- Raymundo M. Campos Vazquez, Gerardo Esquivel and Alma S. Santillan Hernandez. 2017. *The impact of the minimum wage on income and employment in Mexico*. CEPAL Review N° 122 August 2017.
- Repubik Indonesia. 2007. Direktorat Jenderal Pajak. *Undang-undang nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Kementerian Keuangan. Jakarta.
- Repubik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*. Kementerian Keuangan. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2014. *Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Kementerian Dalam Negeri. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah*. Kementerian Keuangan. Jakarta.
- Risyandi. 2018. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kota Payakumbuh Tahun-2000-2017*. Universitas Andalas.
- Rusli, H. 2015. *Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sari, S. Mira, Ethika dan Dandes. 2016. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk, dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten dan Kota Di Provinsi Sumatra Barat Tahun 2010-2014. *Jurnal Fakultas Ekonomi*. Vol. 9 No. 1.
- Siahaan. 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sjafrizal. 2015. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

- Sukanto, G. Rahmawati. 2017. *Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Propinsi Pulau Jawa Tahun 2013)*. Naskah Publikasi.
- Sunandar, G. Reynaldin. 2017. Analisis Pengaruh PDRB, Pengeluaran Pemerintah, Jumlah Penduduk dan Investasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Tahun 2010-2014). *Jurnal Universitas Islam Indonesia*. Yogyakarta.
- Tonin, Mirco. 2011. *Minimum Wage and Tax Evasion: Theory and Evidence*. Discussion Paper No. 5660.
- Widhiyanti, Linda. 2018. *Pengaruh Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung Periode Tahun 2012-2017 Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Badan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Zein, Aliman Syahuri. 2018. Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman* Volume 6 Nomor 1.